

amati fenomena saat ini tentang pandemik covid19 dengan kaca mata komunikasi politik dan buatlah tulisan yang kau rasa yang dilihat dan didengar menjadi sebuah artikel di upload di forum
jangan lupa jaga kebersihan perkuat imunitas dengan menjaga makan dan selalu bahagia sebagai imunitas terbaik optimis dan kreatif sukses selalu untuk kalian generasi penerus yang potensial

Social Distancing, Semua Lewat Digital Menghadapi Wabah Corona Covid-19

Bagi Dunia saat ini siapa yang tak kenal wabah Virus Corona yang sejak Awal Desember yang awal mula masuk di Wuhan Cina dan zona paparanya menyebar hingga ke Singapore, Malaysia, Korea, Jepang, Italy bahkan Indonesia. Maraknya penyebaran virus corona covid-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat yang salah satunya didukung dengan teknologi komunikasi. Masyarakat dituntut bisa dan terbiasa. Perubahan terjadi pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara berperilaku manusia.

Sebenarnya perubahan sosial ini lantaran pandemi corona covid-19 ini sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi melalui digitalisasi yang tanpa kita sadari sudah merealisasikan.

Penerapan Social Distancing, Interaksi Manusia, dan Komunikasi Digital

Sejumlah masyarakat melakukan jaga jarak aman. Jaga jarak atau prosedur social distancing measure harus diterapkan kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Perlu direnungkan, social distancing atau menjaga jarak tidak membuat kita “mati gaya”. Hanya belum sepenuhnya terbiasa dalam keseharian hidup pada pengalihan ruang fisik ke ruang virtual. Komunikasi digital sangat dekat di sekitar kita yang sebenarnya berkontribusi besar.

Kita tetap bisa bersosialisasi melalui berbagai media di era globalisasi ini yang menuntut pada kecanggihan komunikasi digital untuk tetap berinteraksi sosial. Media-media yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran, media interaksi, media pembelajaran.

Jembatan komunikasi melalui media-media tersebut tentunya dapat memberikan edukatif, informatif, dan persuasif. Media yang dimaksud digunakan tanpa melakukan kontak fisik di antaranya *tik tok, twitter, facebook, instagram, line, dan whatsapp*.

Bukankah ini sudah menjadi gaya hidup kita, termasuk orang Indonesia? Misalnya, kebiasaan bangun tidur langsung mencari gadgetnya meskipun sebatas cek pesan masuk, lihat status, dan lainnya.

Saat belum terjadi wabah pandemik Covid-19, kita seringkali disibukkan dengan aktivitas melalui komunikasi sosial yang di mana komunikasi dilakukan tidak harus kontak fisik atau tatap muka. Artinya masyarakat tetap bisa melakukan interaksi sosial dengan menggunakan teknologi komunikasi, terutama media sosial.

Kala itu sempat menjadi kekhawatiran, terutama untuk generasi penerus, dalam luntarnya keakraban secara langsung karena masing-masing seperti memiliki dunianya sendiri. Namun sekarang seolah melempar kesalahan pada kebijakan pemerintah dengan adanya pembatasan jarak sosial.

Teknologi saat ini sudah berkembang demikian pesat sehingga kita bisa tetap saling terhubung tanpa harus secara fisik berada di dalam ruangan atau tempat yang sama. Hal ini diungkap Ketua Tim Teknis Tanggap Covid-19 WHO, Dr Maria Van Kerkhove, seperti dikutip dari *CTV News*.

Mengacu instruksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),

Virus corona sangat mudah menular melalui tetesan atau percikan kecil air yang dikeluarkan seseorang saat bersin ataupun batuk.

Maka social distancing atau pembatasan sosial, dalam Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Hal ini ditujukan pada semua orang di wilayah yang diduga terjangkit virus corona.

Penyebaran virus corona menjadi ancaman serius bagi dunia. Semakin meningkatnya pasien yang terkena virus corona, social distancing ini mengarahkan masyarakat mengurangi interaksi sosialnya dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Pengurangan interaksi sosial melalui social distancing guna pencegahan penyebaran virus corona yang lebih meluas ini dengan cara masyarakat pembatasan penggunaan fasilitas umum dan menjaga jarak interaksi. Masyarakat diminta untuk berdiam di rumah dengan melakukan belajar dari rumah bagi pelajar, bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), dan tidak melakukan aktivitas ke tempat-tempat keramaian guna memutuskan mata rantai penyebaran yang kian bertambah.

Jangan Terlalu Cemas

Social distancing ini lebih tepat menitikberatkan pada physical distancing. Kontak fisik secara langsung dengan jarak berdekatan dapat memberikan peluang penyebaran virus corona.

Sayang nampaknya kita mengalami kelemahan dalam memahami social distancing di hadapan publik sehingga seolah kita hilang peranannya sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan sesama. Hanya pemikiran manusia yang menjadi culture (budaya).

Dengan demikian, diharapkan kita hendaknya tidak terlalu cemas dengan perubahan yang terjadi dalam sosial saat ini yang awalnya karena tuntutan kondisi.

Interaksi kita memang terbatas pada jarak, namun tidak terbatas dalam berinteraksi meskipun ada kalanya akan lebih efektif jika dilakukan secara komunikasi langsung secara tatap muka dalam satu ruang (komunikasi interpersonal)

Nama : Diki Affandi

Kelas : IK4B

Nim : 181910005

Mata Kuliah : Komunikasi Politik

Menurut Saya, Covid-19 menjadi momok yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.

Berbagai diskusi dan pemberitaan muncul tentang *update* terkini masalah pandemi virus ini.

Hal yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan di Indonesia adalah komunikasi pemerintah dalam meredam kepanikan masyarakat.

Mungkin kita sempat baca di beberapa *headline* berita mengenai tanggapan pemerintah yang terkesan *sompral* dan menganggap remeh situasi Covid-19. Misalnya, perkataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan, sangat konfiden dengan adanya virus corona, karena tidak terlalu menakutkan.

"Menkes konfiden, yang dihadapi itu corona, bukan sesuatu yang menakutkan. Justru yang menakutkan itu beritanya," kata Menkes Terawan kepada wartawan di Istana Kepresidenan.

Selain itu, masih banyak lagi tanggapan lain dari pemerintah yang mengundang kejengkelan dari netizen. Mereka menganggap kalau pemerintah masih belum tegas dan menganggap remah, padahal kasus penderita kian bertambah setiap harinya.

Menanggapi hal ini, **Temali** berbincang dengan Dr. Usni Hasanudin, M.Si, Kepala Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ia mengatakan komunikasi memang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan. Namun, dalam kasus virus corona ini, komunikasi yang dilakukan pemerintah sangat berbeda dari biasanya.

"Komunikasi yang dilakukan seakan tidak tersentral atau satu pintu, bahkan setiap lembaga kementerian bisa memberikan pernyataan berbeda-beda satu dengan lainnya," kata Usni.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3).

Menurutnya, pemerintah tidak menganggap remeh kasus ini tapi lebih cenderung kepada penuh rasa kekhawatiran. Banyak faktor yang menyebabkan rasa khawatir itu kian tumbuh di pihak pemerintah. Usni mencatat dua poin utama yang ditekankan dalam komunikasi yang dilakukan pemerintah. Pertama, untuk meredam kekhawatiran masyarakat dan kedua terkait menjaga keyakinan investor untuk tetap berinvestasi dan menjaga sektor wisata.

"Menurut saya hanya ada dua, pertama ingin menyampaikan pesan bahwa Indonesia aman untuk berinvestasi dan berwisata. Kedua, agar masyarakat menyikapinya tidak berlebihan yang dapat menyebabkan kegelisahan. Prinsipnya dalam pandangan saya, pokoknya, jangan berlebihan dan panik tapi harus tetap waspada," tambah Usni lagi.

Selanjutnya, Usni mengatakan pemerintah harusnya berani menyampaikan informasi yang seharusnya disampaikan di tengah pandemik ini agar masyarakat tidak cemas. Mereka disarankan untuk tidak menyembunyikan informasi penting dan menyampaikan dengan sebenar-benarnya.

Sementara itu, belajar dari pengalaman komunikasi pemerintah tersebut Usni menghimbau untuk tetap waspada terutama dan tidak membahayakan diri sendiri. Ikuti segala himbauan dari mulai menjaga kebersihan hingga instruksi lain yang disarankan agar terhindar dari virus corona.

Menurut berita yang ada di media sosial.

Menelusuri Asal Teori Konspirasi 5G dan Corona, Serta Kebenarannya

Benarkah virus corona merupakan fiksi yang dibuat untuk menutupi kerusakan fisik akibat teknologi 5G? Atau, teknologi 5G mempercepat penyebaran corona?

Teori-teori yang mengaitkan teknologi 5G dengan penyebaran virus corona menyebar beberapa bulan belakangan dan tampaknya mulai dipercayai sejumlah orang. Puluhan menara telekomunikasi di Inggris jadi sasaran pengerusakan diduga imbas hal ini. Salah satu teori yang beredar menyatakan teknologi 5G mempercepat penyebaran virus corona lantaran menyerang sistem kekebalan tubuh. Teori ini dibangun dengan argumentasi, Wuhan yang merupakan salah satu kota pertama uji coba 5G di Tiongkok menjadi episentrum virus corona.

Sedangkan teori lain menyatakan virus corona adalah fiksi yang dibuat untuk menutupi kerusakan fisik akibat teknologi 5G. Pendiri Microsoft Bill Gates dituding sebagai "otak" di balik terciptanya virus corona. Tujuannya, untuk mengontrol dunia melalui vaksin buatannya.

Menguji Kebenaran Teori Konspirasi 5G dan Corona Teknologi 5G dan implikasinya terhadap kesehatan memang ramai jadi bahasan. Adapun Tiongkok mulai mengaktifkan beberapa jaringan 5G-nya pada paruh kedua tahun lalu, sedangkan laporan mengenai virus corona di Wuhan muncul sekitar bulan Desember tahun lalu. Bisa jadi, orang-orang yang khawatir dengan 5G jadi mencurigai adanya kaitan antara penerapan teknologi tersebut dengan virus corona karena kronologis ini. Alhasil, muncul teori yang kemudian viral. Namun, benarkah teknologi 5G bisa menyebabkan masalah kesehatan secepat dan separah ini? Untuk itu, penting memahami apa itu teknologi 5G. 5G adalah generasi selanjutnya dari teknologi jaringan nirkabel 4G. Teknologi ini memungkinkan kecepatan akses internet yang jauh lebih tinggi dari 4G. Sama seperti 4G dan generasi sebelumnya, 3G dan 2G, sinyal 5G ditransmisikan melalui gelombang radio. (Baca: Info Terbaru Corona: Sembuh dengan Darah hingga Penularan pada Kucing) Radiasi dari gelombang radio bersifat non-ionizing. Ini artinya, radiasi tersebut tidak merusak DNA dalam sel seperti yang bisa dilakukan oleh sinar X, sinar gamma, dan sinar UV bila terpapar ke tubuh manusia dalam jangka waktu yang lama. Mengacu pada USA Today, terdapat dua tipe dasar sinyal 5G. Pertama, yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi di bawah 6 GHz atau yang dinamakan "sub-6 GHz". Kedua, yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi 24 GHz ke atas yang dinamakan "milimeter wave". Di Tiongkok, satu-satunya tipe yang digunakan adalah sub-6 GHz. Sedangkan rentang frekuensi tipe ini telah digunakan di seluruh dunia untuk berbagai aplikasi. Seluruh jaringan selular 4G menggunakan frekuensi ini, begitu juga Wi-Fi, dan perangkat rumah tangga oven microwave. Ini artinya, jika argumentasi para pembuat teori tentang 5G dan corona benar semestinya kita sudah merasakan dampak dari sinyal-sinyal tersebut bertahun-tahun lalu. Namun, hal itu tidak terjadi. (Baca: Perbankan di Bawah Bayang-bayang Krisis Imbas Pandemi Corona) Sejauh ini, belum ada bukti keterkaitan negatif radiasi non-ionizing dengan kesehatan manusia. Dalam situsnya, organisasi kesehatan internasional -- Center for Disease Control and Prevention dan World Health Organization -- menyatakan studi-studi yang tengah berlangsung belum bisa menjelaskan secara terang tentang

keterkaitan tersebut. Sedangkan peringatan-peringatan kesehatan yang disampaikan WHO seluruhnya terkait dengan kemungkinan menyebabkan kanker setelah penggunaan selama bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade, bukan hitungan satu dua bulan. Adapun seiring meningkatnya sorotan akan implikasi kesehatan dari 5G, lembaga independen yang mengawasi radiasi, Internasional Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), telah membuat panduan baru untuk memproteksi manusia dari efek negatif gelombang radio. “Panduan ini menyediakan proteksi terhadap seluruh efek kesehatan substansial yang disebabkan oleh paparan terhadap gelombang elektromagnetik pada rentang 100 kHz hingga 300 GHz,” demikian tertulis dalam siaran pers ICNIRP, Maret lalu. Lembaga tersebut menyatakan panduan baru ini dikembangkan setelah melakukan kajian menyeluruh terhadap literatur ilmiah yang relevan, workshop ilmiah, dan proses konsultasi publik. (Baca: Ragam Jenis Masker dan Keandalan Menahan Partikel saat Musim Corona) Sejauh ini, sebanyak 30-an negara mulai mengadopsi 5G. Masih banyak negara termasuk Iran, yang memiliki catatan kasus infeksi corona yang tinggi, belum mengadopsi 5G. Fakta ini pun menggugurkan/melemahkan teori yang menyebut bahwa virus corona adalah virus fiktif yang dibuat untuk menutupi dampak negatif 5G. Atau, 5G mempercepat penyebaran corona. Lalu, bagaimana dengan dugaan bahwa Bill Gates berada di balik penyebaran virus corona? Dugaan tersebut di antaranya muncul lantaran yayasan Gates yaitu Bill and Melinda Gates Foundation, memiliki keterkaitan dengan Pillbright Institute. Lembaga ini mengajukan paten untuk virus corona pada 2015. Namun, dikutip dari Full Fact, paten tersebut bukan untuk virus corona yang menyebabkan Covid-19. Virus corona memiliki banyak jenis dan paten ini untuk avian infectious bronchitis virus (IBV) yang lebih lemah dari virus corona yang menyebabkan pandemi saat ini. Lembaga tersebut mengajukan paten untuk bisa membuat vaksin terkait guna melawan penyakit pada burung dan hewan lainnya. Adapun Bill and Melinda Gates Foundation merupakan salah satu yang memberikan pendanaan untuk Pillbright, namun bukan untuk paten ini.

Nama : Dinda Aulya

NIM : 181910034

Kelas : IK-4A

Soal :

Amati fenomena saat ini tentang pandemik covid-19 dengan kaca mata komunikasi politik dan buatlah tulisan yang kau rasa yang dilihat dan didengar menjadi sebuah atikel

Jawaban :

Politik di Balik Virus Corona

Akhir-akhir ini, publik tengah diramaikan oleh persoalan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Corona baru, yakni Covid-19. Virus yang bermula di Wuhan, Tiongkok, ini telah menjangkit banyak negara di berbagai benua.

Penyebarannya pun hingga sekarang diprediksi masih jauh dari kata berhenti. Pasalnya, jumlah kasus penyakit menular ini terus meningkat – khususnya di negara-negara yang menjadi pusat penularan baru seperti Italia dan Iran.

World Health Organization (WHO) sendiri telah menetapkan penyakit akibat virus ini sebagai pandemi global – berarti bahwa penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antarnegara. Kewaspadaan berbagai negara dan masyarakat internasional pun semakin memuncak.

Rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional ini tentunya turut dirasakan oleh publik di Indonesia. Apalagi, dari hari ke hari, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat – mencapai 69 kasus dan 4 pasien meninggal kala artikel ini ditulis.

Dengan adanya perkembangan kasus-kasus positif, menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk beluk dari penyebaran virus ini di Indonesia. Soal lokasi penyebaran misalnya, dianggap perlu agar masyarakat dapat berantisipasi terhadap penularan di daerahnya.

Namun, tampaknya, pemerintah tidak semudah itu untuk menuruti keinginan ini. Sekretaris Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menyebutkan bahwa publikasi atas lokasi penyebaran tidak perlu dilakukan oleh pemerintah karena dapat menimbulkan respons bermacam-macam.

Keengganan pemerintah untuk membuka data lokasi penyebaran Covid-19 ini tentunya tak terhindar dari beberapa kritik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono

misalnya, **menilai** bahwa pemerintah telah melanggar **Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan – tepatnya Pasal 154.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai cenderung membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD misalnya, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dianjurkan untuk berbicara mengenai penyakit ini karena informasi penanganannya dianggap terpusat di Kemenkes.

Tentunya, beberapa upaya pemerintah ini menimbulkan pertanyaan. Apakah benar pemerintah daerah dan masyarakat tak berhak membicarakan dan memperoleh informasi terkait Covid-19 tersebut? Lantas, bagaimana dinamika politik membayangi “perebutan” kewenangan dan informasi ini?

Informasi Jadi Eksklusif?

Bisa dibilang bahwa pemerintah pusat berupaya untuk memusatkan informasi penanganan Covid-19 di Kemenkes. Hal ini bisa jadi membuat akses informasi publik dan pihak-pihak lain semakin terbatas.

Padahal, berdasarkan UU Kesehatan yang sempat dikutip oleh Arief Poyuono, pemerintah sebenarnya perlu menyebutkan daerah-daerah yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Selain itu, UU tersebut juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa.

Selain UU Kesehatan, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan juga diatur dalam **UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**. Dalam Pasal 13, disebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan termasuk dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dengan adanya fakta ketentuan yang terkandung dalam UU Kesehatan dan UU Pemerintah Daerah, bisa dibilang bahwa penanganan penyakit menular Covid-19 ini seharusnya tidak secara eksklusif berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Hal ini tentunya menyisakan pertanyaan baru. Mengapa pemerintah pusat lantas berupaya memusatkan penanganan Covid-19? Bagaimana hal ini dapat dipahami dari dimensi politik?

Apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini mungkin dapat dipahami melalui hubungan konseptual akan pengetahuan (*knowledge*) dan kekuatan (*power*). Hubungan konseptual di antara keduanya ini pernah dikupas oleh beberapa ahli dan pemikir.

Harold Adams Innis – profesor ekonomi politik asal Kanada – misalnya, mencetuskan sebuah istilah atas penguasaan pengetahuan dan informasi, yakni monopoli pengetahuan (*monopolies of knowledge*). Meski Innis lebih banyak menekankan pada penguasaan melalui medium

komunikasi, monopoli pengetahuan juga membuat informasi menjadi eksklusif untuk kelompok tertentu.

Implikasi politik yang perlu dipahami adalah adanya konsekuensi *knowledge* terhadap *power*. Konsekuensi ini mungkin dapat diamati melalui pemikiran Michel Foucault – filsuf asal Prancis.

Berdasarkan pemikiran Foucauldian, *power* dan *knowledge* memiliki hubungan yang saling memberi arti. Seseorang yang memiliki *power* dapat membentuk *knowledge* – seperti kebenaran yang diyakini – di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, *knowledge* dapat memberikan *power* pada pemilik pengetahuan.

Mungkin, dengan membuat informasi dan pengetahuan menjadi eksklusif, pemerintah pusat berupaya untuk menjaga *power* yang dimilikinya. Hal inilah yang disebut-sebut dilakukan oleh pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok.

Dalam mengatasi penyebaran Covid-19, Xi disebut berupaya untuk menutupi informasi penularan. Pemerintah Tiongkok juga dikabarkan semakin **memusatkan kekuatan** dan kontrol dalam merespons penyakit ini.

Sinyal **politisasi** juga terlihat dari kunjungan Xi ke Wuhan, Tiongkok, baru-baru ini. Presiden negeri Tirai Bambu tersebut dianggap berupaya untuk mengirimkan pesan bahwa Tiongkok telah berhasil melalui krisis kesehatan ini dan ingin menjadikan negaranya sebagai percontohan.

Bila kita berkaca pada Tiongkok, bukan tidak mungkin pemerintah pusat di Indonesia juga ingin menjaga citra pemerintahannya melalui pemusatan dan pembatasan *knowledge* layaknya Xi. Namun, asumsi ini juga menyisakan beberapa pertanyaan.

Pasalnya, publik dan media Indonesia sendiri semakin ragu dengan kapabilitas pemerintah pusat. Apalagi, pemerintah dinilai tidak melakukan koordinasi yang efektif atas penanganan virus ini.

Belum lagi, dugaan-dugaan kapabilitas dari dunia internasional bisa juga membuat pemerintah malah dianggap tidak memiliki *knowledge* atas penyebaran virus Covid-19. Beberapa pihak di Australia misalnya, sempat menganggap pemerintah Indonesia tidak memiliki peralatan yang cukup untuk mendeteksi penularan.

Bila benar pemerintah justru tak memiliki pengetahuan yang lengkap atas virus ini, mengapa pemerintah malah terkesan membatasi informasi?

Nama : Febby Ayu Damaiyanti

NIM : 181910044

Kelas : IK4B

COVID-19 Is Pandemic not A Productivity Contest?

Wabah COVID-19 merupakan masalah besar yang sedang dihadapi seluruh negara didunia. Bermula pada bulan Desember 2019 lalu di kota Wuhan, China lalu menyebar keseluruh negara di dunia. Tak luput pada awal Maret lalu menyerang Indonesia seperti yang dikatakan Presiden Jokowi.

Saat awal ramai isu wabah virus corona, masyarakat Indonesia merespon fenomena global ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merespon dengan tenang, serius, satire, sampai ada yang merespon dengan berbagai candaan.

Pernyataan Presiden Jokowi rupanya mempengaruhi situasi dan kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah korban yang positif terjangkit virus corona. Anne Kerr dalam bukunya yang berjudul "*Genetics and Society: A Sociology of Disease*" menjelaskan bahwa fenomena wabah penyakit di masyarakat dapat membuat masyarakat mengalami kecemasan (*anxiety*) dan ketakutan (*fear*). Lalu manakah yang dominan, rasa cemas atau takut?

Sejak terdengar kabar bahwa Indonesia telah terserang masalah Pandemi ini, Pemerintah pun bertindak untuk Masyarakatnya melakukan *SOCIAL AND PHYSICAL DISTANCING* serta tak lupa untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan dan pola makan. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia dapat segera memutus rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Karena hal tersebutlah semua aktivitas belajar, bekerja dan lain-lainnya dialihkan dalam bentuk Daring/Online.

Peningkatan jumlah kasus yang signifikan akhir-akhir ini tentunya membuat publik merasa terancam. Perasaan tidak aman yang dirasakan di masyarakat bukan tidak mungkin dapat memengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Alvin Johnson dalam tulisannya yang berjudul *Economic Security and Political Insecurity* mungkin dapat menggambarkan situasi ini. Dalam tulisan itu, Johnson menjelaskan bahwa setiap manusia pasti menginginkan adanya rasa aman (*security*). Kecemasan yang dirasakan publik Indonesia kini bisa jadi berakar dari adanya ancaman keamanan dari Covid-19.

Mungkin, pembatasan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah bentuk kekhawatiran (*insecurity*) atas ancaman sekuritisasi yang bisa saja dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, penjelasan ini belum tentu benar menggambarkan motif pemerintah pusat untuk mengontrol penanganan agar terkontrol. Hal yang jelas adalah ancaman Covid-19 ini bisa jadi sasaran empuk sebagai sumber sekuritisasi bagi banyak pihak.

Selain itu, Pro dan Kontra terus bermunculan dan sebagai masyarakat yang baik, kita haruslah patuh terhadap aturan pemerintah tersebut. Karena hal ini banyak masyarakat kelas bawah semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Walaupun memang ada beberapa dermawan dan relawan yang bersedia untuk membagi uang dan makanan kepada mereka, tetapi tetap saja itu hanya bertahan sebentar.

Tak luput pula di Sosial media banyak yang menjadikan [#stayathome](#) ini sebagai ajang unjuk produktivitas selama dirumah. Dari yang biasanya dirumah tidak pernah melakukan apa-apa tapi semenjak adanya Corona semua orang menyibukkan diri dengan mencoba memasak, Melukis, Menulis dan membuat hal-hal yang biasanya tak pernah dilakukan. Semuanya di tunjukkan sebagai ajang siapa yang paling produktif selama dirumah. Dengan men-Share kegiatan-kegiatan tersebut di sosial media tentu saja ada yang menganggap hal ini berlebihan. Karena hal tersebut sebetulnya memang tidak ada yang luar biasanya.

Namun, ada pula yang menganggap bahwa [#stayathome](#) ini telah memberikan begitu banyak dampak positif dan memberika rasa syukur yang lebih tinggi terhadap apa yang telahh diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap diri kita untuk lebih menghargai waktu bersama saat berkumpul.

Jadi, dalam suasana COVID-19 ini sendiri saya rasa telah memberikan banyak dampak terhadap diri kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya.

Benarkah COVID-19 Hasil Konspirasi Intelijen?

Jakarta, Gatra.com – Banyak pakar dan ahli intelijen dunia meyakini penyebaran virus COVID 19 tidak terjadi secara kebetulan. COVID 19 diduga hasil dari konspirasi yang memuat skenario, skema, dan desain tertentu. Lebih jauh, tuduhan ini justru dialamatkan kepada negara adidaya, Amerika Serikat (AS).

Pernyataan itu diperkuat oleh keterangan mantan pejabat intelijen militer dari Badan Intelijen Pusat (CIA) dan mantan spesialis ahli-terorisme Amerika Serikat, Philip Giraldi yang mengatakan virus COVID-19, tidak muncul secara alami melalui mutasi melainkan diproduksi di laboratorium.

Dalam pernyataan yang diterbitkan Strategic Culture Foundation (5/3/2020), ia mencurigai Amerika dan Israel terlibat dalam produksi virus tersebut sebagai agen perang biologis. Argumen Giraldi belum terbukti sah. Namun banyak pakar dan pemerhati intelijen meyakini konspirasi ini.

Pengamat militer dan pertahanan, Wibisono mengatakan banyak analisa yang bermunculan mengatakan virus corona diciptakan oleh AS. Menurutnya dalam dunia telik sandi, kecurigaan terhadap kemunculan konspirasi terhadap peristiwa bukan hal yang baru. “Saya termasuk orang yang tidak pernah percaya dengan teori konspirasi, namun saya percaya politik penuh dengan konspirasi,” katanya kepada Gatra.com, Rabu (25/3).

Terlepas dari siapa aktor yang dimungkinkan dalam konspirasi tersebut, Wibi mengatakan perlu bagi para pakar menyimak asal dari kemunculan virus, apakah benar berasal dari Cina?. Menurutnya penting bagi para pakar untuk menyelidiki fakta ilmiah dari kasus COVID 19, dan tidak menggantungkan informasi pada satu literasi berita media saja.

Wibi menyebutkan agak aneh informasi yang menyebutkan virus corona berasal dari laboratorium Wuhan di Cina. Sampel lengkap dari virus menurutnya justru dimiliki oleh laboratorium AS. “Analisa saya, satu-satunya laboratorium yang punya sampel virus hidup dengan lima jenis GEN adalah Bio-Lab militer USA di Fort Detrick, Maryland. Itu sangat mungkin tercipta virus baru di situ. Sementara laboratorium Wuhan di Cina hanya punya satu sampel jenis virus, yang tak mungkin bisa melahirkan varietas jenis virus baru,” katanya.

Ia menyebutkan keterangan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan para pakar yang ada di AS sendiri. “Saya membaca artikel yang ditulis oleh Daniel Lucey, seorang ahli penyakit menular di Universitas Georgetown di Washington. Ia mengatakan dalam sebuah artikel di majalah Science bahwa manusia terinfeksi pertama kali bukan di Wuhan tetapi di tempat lain. Tetapi ada juga yang bilang pada 18 september 2019, yang pasti bukan berasal dari pasar seafood di Wuhan,” ujarnya.

Makalah itu menurutnya juga diperkuat oleh peneliti Cina dari China Academy Science. Dalam artikel tersebut dituliskan rincian tentang 41 pasien pertama yang dirawat di rumah sakit. “Mereka positif terinfeksi apa yang disebut dengan Novel Corona Virus 2019 (2019-nCoV). Pertama kali, pasien jatuh sakit pada 1 Desember 2019 dan tidak memiliki hubungan dengan pasar seafood, data mereka juga menunjukkan bahwa secara total, 13 dari 41 kasus tidak pernah ke pasar seafood,” katanya.

Meski sebagian besar punya historis bepergian ke pasar seafood, tetapi itu menunjukkan penyebaran virus terjadi sebelum bulan Desember 2019. Merujuk pada artikel Science, yang terbit 25 Januari 2020, Andersen memposting di situs web penelitian virologi tentang analisisnya terhadap 27 genom 2019-nCoV. Ia berkesimpulan kelahiran Covid 2019 itu pada tanggal 1 Oktober 2019. “Ada laporan dari Kristian Andersen, ahli biologi evolusi di Scripps Research Institute, yang telah menganalisis urutan 2019-nCoV untuk mencoba memperjelas asal muasal virus corona. Dia mengatakan skenario yang masuk akal adalah orang yang terinfeksi membawa virus ke pasar seafood. Jangan dibalik. Bukan seafood sebagai penyebar tetapi manusia,” ujarnya.

Dilihat dari sisi konspirasi, kejadian tersebut bertepatan saat acara World Military Games yang diadakan di Cina pada 18-27 Oktober lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, dalam pernyataan kerasnya pertengahan Maret lalu, menuding virus corona di Wuhan merupakan kiriman dari militer AS.

Menurutnya dari sana dugaan awal penyebaran virus, kenyataannya pasien nol Covid 2019 yang berjumlah lima pasien adalah warga AS yang berada di Cina. “Setelah itu ada hari raya imlek dimana terjadi eksodus besar besaran orang kota ke desa untuk merayakan imlek di kampung halamannya. Kerumunan orang banyak tak bisa dihindari. Intelijen Cina cepat mengetahui akan serangan Covid 2019. Cina tidak mau ambil resiko terjadi penyebaran virus corona meluas. Apalagi di saat musim dingin. Dengan cepat pemerintah Cina lockdown kota Wuhan,” katanya.

Ia menambahkan varietas virus yang menyerang di Cina juga berbeda dengan kejadian yang ada di Iran dan Italia. “Hasil penelitian membuktikan bahwa varietas genom virus di Iran dan Italia, setelah diurutkan, ternyata tidak memiliki kesamaan dari varietas yang menginfeksi Cina. Artinya itu berasal dari tempat lain”.

Wibisono menyebutkan kemungkinan rentetan serangan senjata biologis itu juga terkait dengan motif ekonomi dan kelanjutan perang dagang. “Ini saya rasa bagian dari rangkaian perang dagang. Sejarah perang dunia kedua berawal dari perang dagang juga. Saling embargo satu sama lain. Akhirnya perang fisik tak terelakan. Kini mungkin orang enggak mau lagi perang fisik. Karena ongkosnya mahal. Tetapi dengan sains, orang bisa membunuh banyak orang tanpa ada kerusakan, akhirnya menggunakan rekayasa biologis,” pungkasnya.

Nama : Julian Finaldy Mustar

Nim : 181910053

Akhir-akhir ini, publik tengah diramaikan oleh persoalan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Corona baru, yakni Covid-19. Virus yang bermula di Wuhan, Tiongkok, ini telah menjangkit banyak negara di berbagai benua.

Penyebarannya pun hingga sekarang diprediksi masih jauh dari kata berhenti. Pasalnya, jumlah kasus penyakit menular ini terus meningkat – khususnya di negara-negara yang menjadi pusat penularan baru seperti Italia dan Iran.

World Health Organization (WHO) sendiri telah menetapkan penyakit akibat virus ini sebagai pandemi global – berarti bahwa penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antarnegara. Kewaspadaan berbagai negara dan masyarakat internasional pun semakin memuncak.

Dengan adanya perkembangan kasus-kasus positif, menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk beluk dari penyebaran virus ini di Indonesia. Soal lokasi penyebaran misalnya, dianggap perlu agar masyarakat dapat berantisipasi terhadap penularan di daerahnya.

Namun, tampaknya, pemerintah tidak semudah itu untuk menuruti keinginan ini. Sekretaris Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menyebutkan bahwa publikasi atas lokasi penyebaran tidak perlu dilakukan oleh pemerintah karena dapat menimbulkan respons bermacam-macam.

Keengganan pemerintah untuk membuka data lokasi penyebaran Covid-19 ini tentunya tak terhindar dari beberapa kritik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono misalnya, menilai bahwa pemerintah telah melanggar Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan – tepatnya Pasal 154.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai cenderung membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD misalnya, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dianjurkan untuk berbicara mengenai penyakit ini karena informasi penanganannya dianggap terpusat di Kemenkes.

Informasi Jadi Eksklusif?

Bisa dibilang bahwa pemerintah pusat berupaya untuk memusatkan informasi penanganan Covid-19 di Kemenkes. Hal ini bisa jadi membuat akses informasi publik dan pihak-pihak lain semakin terbatas.

Padahal, berdasarkan UU Kesehatan yang sempat dikutip oleh Arief Poyuono, pemerintah sebenarnya perlu menyebutkan daerah-daerah yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Selain itu, UU tersebut juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa.

Selain UU Kesehatan, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan juga diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 13, disebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan termasuk dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dengan adanya fakta ketentuan yang terkandung dalam UU Kesehatan dan UU Pemerintah Daerah, bisa dibayangkan bahwa penanganan penyakit menular Covid-19 ini seharusnya tidak secara eksklusif berada di bawah kendali pemerintah pusat.

Political Insecurity?

Peningkatan jumlah kasus yang signifikan akhir-akhir ini tentunya membuat publik merasa terancam. Perasaan tidak aman yang dirasakan di masyarakat bukan tidak mungkin dapat memengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Alvin Johnson dalam tulisannya yang berjudul *Economic Security and Political Insecurity* mungkin dapat menggambarkan situasi ini. Dalam tulisan itu, Johnson menjelaskan bahwa setiap manusia pasti menginginkan adanya rasa aman (*security*).

Kecemasan yang dirasakan publik Indonesia kini bisa jadi berakar dari adanya ancaman keamanan dari Covid-19. Pasalnya, berdasarkan buku milik Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap De Wilde yang berjudul *Security*, keamanan di era sekarang bukan lagi hanya meliputi keamanan tradisional seperti militer.

Bisa jadi, ancaman kesehatan yang disebabkan oleh Covid-19 turut menghantui negara-negara. Ancaman kesehatan seperti ini digolongkan oleh Buzan dan tim penulisnya ke dalam ancaman sektor lingkungan (*environmental*).

NAMA : M.Farid Hidayatullah
NIM : 181910009
KELAS : IK4A

Dunia kali ini sedang di landah duka dan bencana, dengan hadir nya virus COVID-19 atau virus CORONA cukup mengguncang dunia, mulai dari penyebaran yang sangat cepat hingga seluruh dunia , virus ini di nilai sangat berbahaya dengan hanya tersentuh atau terkena air liur dari seseorang yang terinfeksi virus itu dapat dengan cepat masuk ke dalam tubuh kita.

Negara-negara sudah memulai kebijakan mereka dengan melakukan lockdown, dan di Indonesia pun juga melakukan sebuah kebijakan yaitu dengan menyuruh masyarakat nya untuk tetap di rumah saja, dengan melakukan kampanye #dirumahaja. Dengan menyuruh masyarakat untuk tetap di dalam rumah selama 14 hari dengan seperti itu penyebaran virus COVID-19 dapat terputus penyebarannya.

Dengan melakukan WHO atau *Work From Home* beberapa perusahaan juga menerapkan WHO agar karyawan dapat berkerja tanpa harus keluar rumah, tetapi apakah seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan WHO, contoh kecil nya seperti Ojek online mereka harus keluar rumah dahulu baru mereka mendapatkan uang dan jika mereka hanya dirumah mereka tidak bisa memberi makan keluarga nya.

Dirumah aja seperti kata pemerintah tetapi kebijakan itu berlaku untuk Tunawisma yang jelas-jelas mereka tidak mempunyai tempat tinggal, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kalangan-kalangan yang lebih rentan terkena virus ini, pemerintah dianggap masih kurang peduli dengan hal-hal kecil seperti itu.

Bahkan lebih parah nya di tengah-tengah pandemik seperti ini mereka secara diam-diam ingin menggesahkan undang-undang yang jelas-jelas merugikan rakyat dan perkerja khususnya seperti Omnibus Law, seharusnya pemerintah harus lebih fokus untuk menangani pandemik ini bukan malah membuat keadaan baik malahan justru pemerintah secara terang-terangan ingin membunuh rakyat nya sendiri.

Dan juga pemerintah dinilai kurang transparan mengenai penyebaran virus ini, dengan tidak melakukan transparansi seperti ini masyarakat justru lebih rentan terkena Hoax dikarenakan penyebaran informasi yang kurang jelas yang di dapat oleh masyarakat, dan yang lebih ajaib nya aparaturnegara dengan konyol nya membuat Hoax soal penjarahan yang akan dilakukan oleh kelompok Anarko, dengan menangkap sejumlah orang dengan bukti-bukti yang bisa dibilang cukup lucu yaitu buku-buku.

Menurut analisa saya dengan membuat berita penjarahan itu pemerintah dengan cerdasnya dapat melaksanakan Darurat Sipil yang sebenarnya tidak di perlukan dan justru membuat masalah baru bagi masyarakat, lagi-lagi rakyat yang di buat susah. Pemerintah dinilai kurang bijak dan justru menganggap pandemik ini hanya lah masalah spele.

Nama : Marisa Nuraini Fadillah Putri

Nim : 181910013

Kelas : IK4A

pandemi covid-19 ini merupakan bentuk bahaya yang memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari sosial,ekonomi,kesehatan bahkan psikologis.kondisi kerentanan sosial(social vulnerability) menjadi realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 diketahanan masyarakat mengalami guncangan akibat pendemi covid-19.

Dan pandemi covid-19 di indonesia kian hari terus meningkat.pandemi covid-19 di indonesia memiliki dampak multi sektor,dari kesehatan,pendidikan,sosial,ekonomi,hingga aktifitas beribadah masyarakat.Dampak pada sektor-sektor tersebut kian hari mulai dirasakan masyarakat dan menyangkut pada kesejahteraan sosial masyarakat

ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk dapat menggunakan sumber daya yang tersedia(seperti ,teknologi,makanan,pekerjaan dan rasa aman-nyaman)dalam memenuhi kebutuhan daasar dalam menjalankan fungsi sosialnya,namun kondisi saat ini justru menjadikan ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sossial yang membuat produktivitas menurun,mata pencarian terganggu dan kecemasan sosial di masyarakat.

mengapa intruksi mengenai social distancing tidak berjalan secara efektif, disebabkan inturksi ini dianggap menciptakan kerentanan sosial pada mayarakat,khususnya pada masyarakat yang memiliki pekerjaan informal yang sumber ekonomi yang didapatkan dari pekerejaan itu dan tidak memiliki gaji pokok tetap (seperti pedanggang / ojek online.selain maslaah pekerjaan faktor lain yang membuat sosial distancing tidak efektif karna faktor dari karakteristik kultural masyarakat serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas.seharusnya

menerapkan kebijakan seperti karantina wilayah atau lockdown dan tidak memperbolehkan orang asing ke Indonesia, serta menutup akses jalur dari darat maupun udara.

Harusnya Indonesia belajar menangani kasus ini dari negara-negara yang berhasil menekan angka penyebaran COVID-19 ini dan bagaimana cara mereka menangani kasus ini dengan baik.

NAMA : MEGAWATI

KELAS: IK4A

NIM : 181910019

KOMUNIKASI POLITIK

VIRUS CORONA JADI ISU POLITIK PEMILU AS



Ancaman virus corona sudah menjadi isu politik dalam kampanye pencalonan presiden Amerika Serikat, dimana pihak Demokrat mempertanyakan kredibilitas Presiden Donald Trump, dan kompetensinya dalam merespon darurat kesehatan publik, yang juga membuat penurunan ekonomi Amerika secara mendadak.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penyebaran virus itu akan mengganggu proses pemilu, dengan membatasi pertemuan umum untuk kampanye, konvensi politik, dan bahkan tempat-tempat pemilihan atau TPS. Tradisi jabat tangan politis dan mencium bayi bisa saja menjadi cerita masa lalu.

Wabah virus corona di Amerika Serikat sudah menyebar ke lebih dari 16 negara bagian, dengan jumlah pasien corona terus bertambah. Secara global, dilaporkan sudah ada lebih dari 95.000 orang terinfeksi, serta 3.000 orang meninggal dunia. China menjadi lokasi terparah sejak virus itu pertama kali muncul akhir Desember lalu.

Presiden Donald Trump pekan ini mengatakan, sejak wabah itu dimulai, pemerintahannya telah mengambil langkah paling agresif untuk melindungi rakyat Amerika. Namun, perubahan cara manajemen krisis baru-baru ini terganggu, menurut sejumlah kritik, oleh pernyataan Trump di masa lalu yang tidak menganggap serius ancaman virus corona pada kesehatan publik.

Kurangnya komunikasi dan pemahaman terkait Covid-19

Kesan yang muncul bahwa pemerintah kurang transparan dalam menyampaikan informasi terkait Covid-19 kepada masyarakat. Informasi yang diberikan khususnya terkait pasien tidak terperinci. Permasalahan kita itu adalah pada komunikasi publik yang kita tidak bisa setransparan sebagaimana negara-negara lain. Alasan pemerintah memberikan informasi yang tidak terperinci, karena tidak mau menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Para Medis pun belum banyak pengalaman dalam menangani kasus covid-19 karena penyakit ini terbilang baru dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang bahaya covid-19 sehingga kasus terus bertambah. Maka dari itu marilah kita menaati peraturan pemerintah untuk #dirumahaja agar meminimalisir penularan covid-19 dan demi keselamatan bersama. Semoga Indonesiaku lekas pulih

Nama : Mohammad Iqbal Alrisandi

Nim : 181910065

Kelas : IK4A

Dalam dua bulan belakangan ini, jagat Nusantara diguncang dengan kehadiran “tamu tak diundang” yang merebak menghapus jejak pelataran diskusi terkait hilangnya eks-kader PDIP Harun Masiku, *omnibus law*, dan konflik intoleransi yang menjadi *trending topic* di berbagai media massa hingga layar televisi.

Ketiga kasus tersebut nampak ikut “terjangkit” oleh virus Corona jenis baru (Covid-19) sehingga lenyap ditelan waktu. Ibarat senja, kehadirannya selalu manjakan mata sembari tenang batin. Namun, selepas pergi sebelum malam, rupanya ada seutas kerinduan bahkan lara yang ditinggalkan. Kira-kira, analoginya seperti itu.

Masyarakat semakin cerdas politik sehingga mereka lebih kritis pada isu yang menyangkut hajat hidup mereka. Hal tersebut terbukti dari banyaknya demonstrasi akhir-akhir ini yang diinisiasi oleh aliansi masyarakat sipil untuk menolak RUU Omnibus Law. Meskipun terjadi secara sporadis di sejumlah daerah, aksi-aksi dengan mengusung narasi yang sama ini menandakan bahwa terjadi kemerosotan public trust terhadap kekuasaan.

Fenomena protes menolak RUU Omnibus Law mencerminkan sinisme publik dalam melihat kinerja pemerintah yang mulai mengkhawatirkan bahkan sebelum genap satu tahun berkuasa. Hal ini perlu mendapat perhatian dan ditanggapi lebih cermat agar public trust terhadap pemerintah bisa tetap terpelihara hingga akhir periode kekuasaan.

Bukankah kita menghendaki kemaslahatan bagi semua?

Kita selalu berharap bahwa kesiapan maupun sikap kita dalam menghadapi pandemi Covid 19 tidak diperkeruh oleh isu politik. Pemerintah pusat tidak perlu menaruh kecurigaan politis dengan pemerintah daerah yang mengambil tindakan inisiatif lebih awal. Pemerintah daerah juga perlu mengedepankan koordinasi yang baik di awal dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan strategis di wilayah. Agar bisa saling sinergis dan tidak saling curiga.

Keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara perlu diutamakan. Kepercayaan publik pada kekuasaan akan terpelihara dengan sendirinya seiring dengan kehadiran negara di tengah mereka. Segala kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan pada akhirnya akan menciptakan keselamatan bagi sebuah negara. Dalam situasi krisis ini, respon yang tepat dari pemerintah akan menghasilkan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.

Nama : Okta Riadi

Kelas : IK4A

Nim : 181910021

Dengan adanya perkembangan kasus-kasus positif covid-19, menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk beluk dari penyebaran virus ini di Indonesia. Soal lokasi penyebaran misalnya, dianggap perlu agar masyarakat dapat berantisipasi terhadap penularan di daerahnya.

Namun, tampaknya, pemerintah tidak semudah itu untuk menuruti keinginan ini. Sekretaris Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menyebutkan bahwa publikasi atas lokasi penyebaran tidak perlu dilakukan oleh pemerintah karena dapat menimbulkan respons bermacam-macam.

Keengganan pemerintah untuk membuka data lokasi penyebaran Covid-19 ini tentunya tak terhindar dari beberapa kritik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono misalnya, **menilai** bahwa pemerintah telah melanggar **Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan – tepatnya Pasal 154.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai cenderung membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD misalnya, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dianjurkan untuk berbicara mengenai penyakit ini karena informasi penanganannya dianggap terpusat di Kemenkes.

Nama : Rizky Adinda Putri

Kelas : IK4A

NIM : 181910014

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyatakan bahwa corona virus menjadi pandemi global karena penyebarannya yang begitu masif di seluruh dunia. Tercatat terakhir ada 381.653 kasus covid-19 diseluruh negara dengan jumlah orang yang sembuh sebanyak 102.429 dan jumlah orang yang meninggal akibat kasus ini mencapai 16.558 orang. Sementara di Indonesia terdapat 579 kasus covid-19 dengan jumlah orang yang meninggal sebanyak 49 orang dan 30 orang dinyatakan sembuh. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin. Social distancing lebih dipilih sebagai solusi ketimbang harus memberlakukan lockdown yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara. Lalu apa sebenarnya alasan pemerintah Indonesia memilih social distancing? Apakah pandemik covid-19 dapat memberi dampak terhadap menurunnya ekonomi di Indonesia? Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan angka pertumbuhan ekonomi?.

- Social distancing vs Lock Down

Inti dari social distancing adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, sedangkan lockdown berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Menurut Wiku Bakti (Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) dikutip dari CNBC Indonesia, mengatakan alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memberlakukan social distancing dibanding lockdown adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila lockdown diberlakukan. Dikutip dari Indozone.id, Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislaus Riyanta juga ikut angkat bicara terkait hal ini, ia berkata bahwa “Jangan bandingkan Indonesia dengan negara maju yang melakukan lockdown, kebanyakan warga negara mereka sudah punya asuransi, jaminan pekerja, dan mereka akan tetap mendapatkan gaji bulanan walaupun mereka tidak bekerja.” Serta jika lockdown diberlakukan juga akan mempersulit mobilitas barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar di suatu wilayah, belum lagi pemerintah juga harus menjamin pasokan kebutuhan pokok kepada seluruh warga negara yang terkena dampak jika lockdown diberlakukan. Social distancing setidaknya memberlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara, diantaranya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Seluruh warga negara harus menghormati himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang social distancing, agar angka penyebaran virus ini bisa ditekan.

- Ancaman Krisis Ekonomi

Banyak sekali negara sudah mengalami guncangan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemik covid-19, tak terkecuali Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia mengalami kondisi dilematis yakni dihadapkan oleh dua pilihan yang cukup berat, memilih untuk menyelamatkan kesehatan warganya atau menyelamatkan aktivitas ekonomi. Tentu prioritas di setiap negara adalah jatuh pada pilihan pertama yakni menyelamatkan kesehatan warganya, akan tetapi ada konsekuensi logis yang harus dihadapi berupa kemerosotan ekonomi. Sampai-sampai Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF), Kristalina Georgieva, seperti dikutip dari Market Watch mengatakan bahwa, "pertumbuhan ekonomi global akan 0,1 persen lebih rendah dari prediksi sebelumnya". Indonesia juga akan terkena dampak ekonomi akibat pandemik covid-19, diprediksi sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya pada tahun 2019 mencapai 5,02 persen dan pada APBN 2020 ditargetkan mencapai 5,3 persen terancam gagal. Karena para ekonom mengatakan bahwa ekonomi Indonesia maksimal hanya akan tumbuh diangka sekitar 4 persen dan paling buruk bisa tumbuh diangka 2,5 persen apabila pandemik covid-19 di Indonesia lamban ditangani. Rupiah Indonesia setelah bertahan lama diangka 14.000 per dollar AS, kini angkanya mencapai 16.550 per dollar AS atau melemah sekitar 4,09% dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tiap hari kian anjlok, sampai-sampai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat surat bernomor S-274/PM.21/2020 memerintahkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), apabila IHSG berada dalam tekanan atau turun sekitar 5 persen dalam sehari, maka perdagangan harus dihentikan sementara selama 30 menit. Data terakhir IHSG pada akhir perdagangan di hari Senin (23/03/2020), bursa ditutup semakin rendah hingga level dibawah 4.000. Aktivitas bisnis terancam juga mati, sebagai contoh adalah bisnis hotel di Jakarta yang tingkat okupansinya hanya sekitar 30 persen setelah masifnya penyebaran covid-19, artinya 70 persen kamar di setiap hotel yang ada di Jakarta kosong. Hal itu membuat pebisnis hotel memutar otak, banyak yang melakukan sistem bergilir kepada karyawannya dan memangkas anggaran karyawan sebanyak 50 persen karena karyawan tidak akan dipekerjakan secara penuh, hal itu dilakukan untuk menekan resiko bisnis.

- Kebijakan Pemerintah

Langkah mengamankan nilai rupiah sudah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan memberlakukan jenis penjaminan (underlying) transaksi bagi para investor asing sehingga bisa menjadi alternatif terhadap lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Adapun langkah lain yang diambil oleh bank sentral dalam rangka menekan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah adalah dengan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar Domestic Non Delivery Forward (DNDF), pasar spot, pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mengintruksikan kepada seluruh perusahaan plat merah untuk melakukan buyback saham dalam merespon pelemahan IHSG. Arya Sinulingga (Staf Khusus Menteri BUMN), seperti dikutip dari Kompas, mengatakan ada 12 perusahaan BUMN yang melakukan buyback saham, nilainya 7 sampai 8 triliun). Buyback saham

berfungsi meningkatkan demand saham dan ketika supply tetap, maka harga saham akan cenderung naik. Buyback saham juga mengurangi jumlah saham beredar sehingga penghasilan per lembar saham (earning per share - EPS) mengalami kenaikan. Dalam penanganan permasalahan okupansi hotel, pemerintah seharusnya memberlakukan pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu untuk daerah terdampak paling parah covid-19, tidak hanya hotel di 10 daerah pariwisata saja yang mendapat kebijakan ini, atau juga pemerintah bisa menanggung setengah okupansi hotel atau sekitar 35 persen kamar yang kosong, agar bisa menekan resiko kerugian pebisnis hotel akibat kebijakan social distancing dan pembatasan penerbangan dari dan menuju Indonesia.

Presiden Joko Widodo selalu menekankan untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut untuk refocusing kegiatan dan relokasi anggaran agar para pejabat daerah bisa fokus dalam menangani pandemi covid-19 dan melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran yang bukan menjadi prioritas. Himbauan tersebut patut diapresiasi dan dilakukan oleh seluruh aparat pemerintah di daerah-daerah se-nusantara, sinergitas antara pusat dan daerah dalam menyikapi pandemi global seperti covid-19 yang sekarang terjadi harus dilakukan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 juga harus melakukan langkah-langkah strategis agar pandemi covid-19 di Indonesia cepat usai. Karena jika tidak kunjung selesai, dampak terhadap ekonominya bisa saja lebih buruk daripada potrait ekonomi saat ini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Nama : Afta apriansyah
Kelas : IK4B
Nim : 181910048
Mk : Komunikasi Politik

Kasus positif covid 19 di sumsel menjadi 22 orang

Pertempuran antara masyarakat sumsel melawan **Covid-19** belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Data dari juru bicara Satgas, Yusri, kepada wartawan, Rabu (15/4/2020) bahwa kasus positif **covid 19** bertambah mula-mula 19 orang sekarang menjadi 22 orang. Sementara itu, untuk data terbaru ODP di Sumatera Selatan total mencapai 2.255. Untuk yang sudah selesai pemantauan 1.672 dan masih dalam pemantauan 583. Tak di pungkiri lagi kerja sangat berat bagi dokter dan Perawat adalah tulang punggung semua sistem kesehatan. Apalagi, saat ini banyak perawat berada di garis depan dalam pertempuran melawan **COVID-19**. Dia juga menambahkan bahwa sangat penting bagi perawat untuk "mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjaga dunia tetap sehat. Perawat bukan lah garda terdepan untuk melawan **covid-19**. Yang menjadi garda terdepan ialah masyarakat itu sendiri dengan tetap berada di rumah, banyak berkembang jargon **#StayAtHome** salah satu jargon agar masyarakat peduli dan saling membantu untuk kesehatan bersama. Semoga bumi kita lekas sembuh.

#stayathome

#dirumahaja

#PSBB

#Bumicepatpulih

#UBDpalembang

Nama : Aldo Kevinanda

NIM. : 181910051

Hukum tertinggi dari sebuah negara adalah, keselamatan warga negaranya. Ini lebih tinggi dari konstitusi.” Cicero mungkin kata-kata itu sangat tepat untuk sekarang dalam rangka mendorong Negara agar lebih berani mengambil resiko demi keselamatan rakyatnya.

Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dinilai beberapa pihak tidak cukup maksimal untuk menghentikan laju keganasan covid-19 ini, berkaca dari langkah-langkah yang diambil oleh negara yang lebih dulu terkena pandemi ini, seharusnya pemerintah sudah bisa mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kalau-kalau Corona masuk ke Indonesia. Terkesan meremehkan Corona, dari tiga bulan yang lalu saat persebaran Corona sudah mencapai ke 112 negara, semua negara mempersempit keluar masuknya orang dari luar negeri. Tapi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia? Yah, pemerintah Indonesia malah memberikan diskon sebesar 50% ke 10 tempat wisata unggulan di dalam negeri. Ekonomi selalu menjadi motif.

Pemerintah seperti tidak mempunyai bekal. Apa yang terjadi di istana sesungguhnya diikuti juga oleh rakyatnya, karena pemberitaan media dan kebijakan pemerintah dinilai masyarakat tidak terlalu serius, maka respon rakyat terhadap pandemi ini pun lebih “berani” lagi, terlihat ketika pemerintah mengumumkan bahwa di Indonesia Nihil kasus, netizen mulai membuat meme yang berbaur meremehkan. Ada yang berbunyi “corona di kerokin selesai” ramai sekali pernyataan seperti itu di berbagai media sosial bahkan sempat ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional.

Seiring berjalannya waktu keganasan virus Corona pun mulai tampak, korban pun terus bertambah. Banyak negara-negara sahabat membantu Indonesia dalam menangani virus ini, tak terkecuali China. China mengirimkan APD yang mulai langka di Indonesia bahkan dunia. Menarik untuk dibahas tentang bantuan APD dari china. Ketika bantuan sudah tiba di Indonesia kejutannya bukan main ternyata di APD itu ada tulisan Made in Indonesia, yah cukup mencengangkan sekaligus mengagetkan. Untuk mengetahui ini ada baiknya kita mengetahui bahwa saat pertamakali muncul wabah Corona ini, memang pemerintah China dari awal sudah menutup-nutupi keganasan Corona, mulai dari virus ini hanya bisa menular dari animal to human bukan human to human, yah ini termasuk propaganda China agar dunia tidak terlalu memperhatikan virus ini.

Pada saat itu China memborong semua APD di seluruh dunia termasuk Indonesia sendiri yaitu sebanyak 250 juta buah APD, jumlah yang cukup besar memang dan seiring berjalannya waktu dunia mulai tersadar betapa ganasnya virus ini. APD menjadi barang yang paling dicari di dunia, di Indonesia sendiri sempat terjadi kelangkaan selama hampir satu bulan, hal ini diungkapkan oleh dr. Elina Burhan di salah satu televisi nasional, dan bahwa APD hanya bertahan cuman 7 hari kedepan ini beliau sampaikan empat pekan berkali-kali kedepan Fadjoel Rachman selaku juru bicara presiden pada acara yang sama. Saat terjadi kelangkaan inilah China yang dari awal sudah memborong APD, menjual kembali ke negara, jadi tidak ada bantuan murni, selalu ada imbalan di balik bantuan, yah China menjualnya kembali dengan harga 10 kali lipat.

Berbicara tentang penanganan pandemi ini, ada baiknya pemerintah berkaca pada negara yang metode penanganannya sudah terbukti menekan jumlah penyebaran. Oke diawal pemerintah menyatakan bahwa opsi lockdown tidak akan pernah dilakukan, tetapi seiring berjalannya waktu terlihat pemerintah dilema, karena ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Jika lockdown diterapkan maka pemerintah berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya hidup warga

negaranya, sekarang timbul pertanyaan apakah negara kita punya uang? Menurut saya itulah alasan pemerintah pusat tetap berpegang teguh pada pendirian itu meskipun pendirian itu semakin lama semakin bergeser, pemerintah terkesan gengsi untuk mengikuti saran para pakar.

Tetapi sangat bertentangan dengan langkah yang diambil pemerintah DKI Jakarta, gubernur Anies Baswedan memberlakukan psbb. Kemudian diikuti oleh pemerintah pusat, jadi yah sebenarnya tidak ada hal baru yang dilakukan pemerintah. Pemerintah hanya melegalkan apa yang dilakukan oleh kepala daerah, bingung juga kan? Sebenarnya siapa presiden Indonesia?

Ketika Jakarta sudah memberlakukan psbb, yang salah satunya mengatur pembatasan untuk Pengendara motor tidak boleh berboncengan, keluarlah Permenhub yang memperbolehkan berboncengan. Sebelumnya keputusan gubernur DKI sudah di dukung oleh UUD karantina kesehatan.

Rasanya susah jika tidak dikaitkan dengan nuansa politik, pemerintah juga masih ragu untuk mengambil langkah demi menjaga citranya dan sayangnya cara menjaga citranya itu berdampak buruk.

Di negara China saja yang benar-benar memberlakukan pembatasan sangat ketat, butuh waktu sampai 3 bulan, jika berkaca dengan Indonesia, banyak ahli mengatakan kapan bencana ini akan berlalu belum terlihat sama sekali.

Kita melihat semakin hari, garda pertahanan terakhir dalam menghadapi bencana non-alam ini semakin kewalahan menghadapi pasien. Mereka mempertaruhkan waktu, tenaga bahkan nyawa. Karena, virus ini tidak boleh kita anggap hal yang sepele. Memutus mata rantai penyebaran adalah tanggung jawab bersama. Tetapi jika dimulai dari pemerintah tentu segenap rakyat akan mendukung, karena sudah terbukti, solidaritas sudah mendarah daging dinegeri ini.

Keputusan lockdown memang akan sangat sulit untuk dilalui, tetapi demi menyelamatkan segenap tumpah darah Indonesia, bahkan hal itu wajib dilakukan atas hal yang lebih tinggi dari konstitusi sekalipun, keselamatan rakyat.

Waktu semakin berlalu belum terlihat perubahan ke arah positif, bahkan diasia tenggara Indonesia menjadi epicentrum penyebaran COVID – 19. Mudah-mudahan bencana non alam ini cepat berlalu. Dan yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah selalu menjaga kebersihan, dirumah saja, pakai masker saat beraktivitas dan selalu jaga jarak aman.

Nama:Alj hazal Zuhurga

Kelas:IK4A

Nim :181910015

Mewabahnya Covid-19 di banyak negara dan di Indonesia sudah mempengaruhi perekonomian dunia dan Indonesia, ini berkaitan dengan Ekonomi. Dilibatkannya Instansi Militer dan aparat Keamanan lainnya juga sudah melibatkan Pertahanan dan Keamanan.

Kritikan terhadap Pemerintah karena dianggap lamban atau salah dalam menyikapi masalah Covid-19 juga sudah masuk keranah Politik. Himbauan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan/berkumpul di rumah ibadah ada yang mengasosiasikan dengan ajaran Komunis, dan ini menyangkut ke Ideologi.

Bila dilihat dari Aspek Alamiah, Kondisi Geografis negara Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dan berada di persimpangan dunia mau tidak mau akan ikut juga merasakan wabah Covid -19. Kondisi negara yang banyak pulau bisa cukup menguntungkan untuk mencegah berkembangnya Covid-19 dari satu pulau ke pulau lainnya selama bisa diatur dengan baik. Dari Gatra Kekayaan Alam, pemanfaatannya akan terkendala dan tentunya tidak akan banyak bisa dinikmati Masyarakat apabila Covid-19 tidak segera dihentikan.

Dari Keadaan dan Kemampuan Penduduk (Demografi), inilah yang harus terus menerus diperhatikan. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah benar-benar sudah sangat serius dan sudah memimpin, memegang komando dan kendali penuh dalam perang menghadapi Covid-19.